

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Sape Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau” ini ditulis oleh Novatus Jelly Kuncoro, NIM. E1012171084, pembimbing Dr.H. Martoyo, M.Si Nahot Tua Parlindungan Sihaloa, S.Pd, M.IP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sape Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sape Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau.. Sumber data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah Reduksi Data, Data Display dan Kesimpulan/Verifikasi. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pada indikator perencanaan dapat disimpulkan bahwasannya dalam penyusunan rencana pembangunan desa jangkang menengah, pemerintah desa selalu melibatkan unsur masyarakat dan aparat kepolisian dan aparat TNI, serta semua tokoh masyarakat baik tokoh adat, tokoh agama serta masyarakat setempat serta memberikan saran dan masukan kepada pemerintah desa. dan mengenai perencanaan pembangunan desa menurut aparat desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah berdasarkan peraturan dan ketetapan yang ada berdasarkan pedoman RPJM namun beberapa hal tidak terpenuhi akibat kurangnya sumber daya manusia. Namun masyarakat tidak tau dan paham mengenai adanya pedoman dan ketetapan dalam menetapkan dan merencanakan pembangunan desa. adapun tingkat kepuasan masyarakat desa terkait infrastruktur yang disetujui dalam pembangunan desa yakni masih ada masyarakat yang masih tidak puas di karenakan tidak semua aspirasi masyarakat ditindak lanjutkan serta indikator pelaksanaan, pada peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sape Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau dalam proses penetapan pelaksana pembangunan dilakukan oleh kepala desa berdasarkan peraturan dan pedoman yang ada, dan proses penetapan tersebut kepala desa memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan pelaksana pembangunan Desa Sape. Sedangkan masyarakat tidak paham mengenai proses penetapan pelaksana pembangunan di karenakan tidak dilibatkan dalam proses tersebut.

Kata Kunci: Kinerja Pemerintah; Pembangunan Infrastruktur; Pemerintah Desa.

ABSTRACT

The thesis entitled "The Role of the Village Head in Road Infrastructure Development in Sape Village, Jangkang District, Sanggau Regency" was written by Novatus Jelly Kuncoro, NIM. E1012171084, supervisor Dr. Imran and Dr. Jamal Bald. This study aims to determine the role of the village head in the development of road infrastructure in Sape Village, Jangkang District, Sanggau Regency and to determine the factors that influence the development of road infrastructure in Sape Village, Jangkang District, Sanggau Regency. The data sources used are Primary Data and Secondary Data. The data analysis technique used is Data Reduction, Data Display and Conclusion/Verification. The results obtained that the planning indicators can be concluded that in the preparation of medium-term village development plans, the village government always involves elements of the community and police and military officers, as well as all community leaders, both traditional leaders, religious leaders and local communities and provide suggestions and input. to the village government. and regarding village development planning according to village officials carried out by the village government based on existing regulations and provisions based on RPJM guidelines but several things were not fulfilled due to lack of human resources. However, the community does not know and understand the existence of guidelines and provisions in determining and planning village development. As for the level of satisfaction of the village community regarding the approved infrastructure in village development, there are still people who are still dissatisfied because not all community aspirations are followed up and implementation indicators, on the role of the village head in road infrastructure development in Sape Village, Jangkang District, Sanggau Regency in the process of determining The implementation of development is carried out by the village head based on existing regulations and guidelines, and the process of determining the village head has a very large role in determining the implementation of the development of Sape Village. Meanwhile, the community does not understand the process of determining development implementers because they are not involved in the process.

Keywords: Government Performance; Infrastructure development; Village government.

RINGKASAN SKRIPSI

Penelitian ini berjudul Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Sape Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau. Permasalahan (a). Kinerja Pemerintah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa belum optimal. (b). Kurangnya pengendalian terhadap pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berasal dari Alokasi dana Desa. (c). Kurangnya sosialisasi pemerintah desa pada masyarakat dan transparansi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang masih bersifat dirahasiakan. (d). Terlambatnya pengajuan dan pertanggungjawaban tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (e). pengelola atau penguasa (kepala desa) anggaran tidak sepenuhnya dapat mengelola anggaran yang diajukan setiap tahunnya.

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif kualitatif. Tempat penelitian ini adalah Kantor Desa Sape Kabupaten Sanggau, dengan pertimbangan penulisan dapat mengajukan lokasi penelitian dengan mudah dan cepat. Sumber data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah Reduksi Data, Data Display dan Kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Pada indikator perencanaan dapat disimpulkan bahwasannya dalam penyusunan rencana pembangunan desa jangkang menengah, pemerintah desa selalu melibatkan unsur masyarakat dan aparat kepolisian dan aparat TNI, serta seluruh tokoh masyarakat baik tokoh adat, tokoh agama serta masyarakat setempat serta memberikan saran dan masukan pada pemerintah desa. Dan mengenai perencanaan pembangunan desa menurut aparat desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah berdasarkan peraturan dan ketetapan yang ada berdasarkan pedoman RPJM namun beberapa hal tidak terpenuhi akibat kurangnya sumber daya manusia. Namun masyarakat tidak tau dan paham mengenai adanya pedoman dan ketetapan dalam menetapkan dan merencanakan pembangunan desa. Adapun tingkat kepuasan masyarakat desa terkait infrastruktur yang disetujui dalam pembangunan desa yakni masih ada masyarakat yang masih tidak puas dikarenakan tidak semua aspirasi masyarakat

ditindak lanjutkan. (2). Pada indikator pelaksanaan, pada peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sape Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau dalam proses penetapan pelaksana pembangunan dilakukan oleh kepala desa berdasarkan peraturan dan pedoman yang ada, dan proses penetapan tersebut Kepala desa memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan pelaksanaan pembangunan Desa Sape. Sedangkan masyarakat tidak paham mengenai proses penetapan pelaksana pembangunan di karenakan tidak dilibatkan dalam proses tersebut. (3). Pada indikator pengawasan dan pemantauan pada peran Kepala Desa Sape Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau yakni pengawasan dan pemantauan yang dilakukan pemerintah sudah merasa melakukan yang terbaik dalam memberikan pemantauan dan pengawasan, namun masyarakat masih tidak mengetahui pemberitahuan akan fungsi dan tugas dari BPD sendiri. Dan partisipasi masyarakat mengenai pengawasan dan pemantauan berdasarkan pemerintah desa bahwasannya partisipasi masyarakat masih kurang baik itu kurang kesadaran dan kurang pengetahuan pentingnya sebuah pengawasan dan pemantauan pada pembangunan infrastruktur. (4). Indikator faktor pendukung dari peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan desa di Desa Sape Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau ini dapat disimpulkan faktor pendukung dalam pembangunan infrastruktur desa yang yakni adalah, adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat, pendanaan APBD yang mencukupi untuk melakukan pembangunan, serta regulasi yang diberikan kepada desa untuk mengelola daerahnya menjadi lebih mudah.